



KEMENTERIAN SOSIAL RI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 INSPEKTUR JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Dadang Iskandar
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : Tri Rismaharini
Jabatan : Menteri Sosial RI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,



Tri Rismaharini

Pihak Pertama,



Dadang Iskandar

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR JENDERAL**

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya tata kelola kementerian Sosial yang berkualitas	1	Persentase batas materialitas temuan pengawasan	2
		2	Level Kapabilitas APIP (IACM)	3 (Integrated)
		3	Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	85
		4	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	95
		5	Nilai penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas SPIP Satker Kementerian Sosial	4
		6	Nilai Evaluasi Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial	90
		7	Jumlah Unit Kerja Eselon I yang mendapat nilai evaluasi SAKIP yang memuaskan (A)	3 Unit Kerja
		8	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	90
		9	Persentase naskah hukum yang ditetapkan sesuai rencana	100
		10	Jumlah satker yang memenuhi syarat diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM	15
2.	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial	11	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Inspektorat Jenderal	90

Program/Kegiatan Tahun 2023	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	
Kegiatan	
1. Pengelolaan Resiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal :	Rp. 18.108.704.000
a. Pengawasan Bidang Pemberdayaan Sosial	Rp. 3.305.050.000
b. Pengawasan Bidang Rehabilitasi Sosial	Rp. 3.248.870.000
c. Pengawasan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 3.342.070.000
d. Pengawasan Bidang Penunjang	Rp. 3.214.010.000
e. Analisis Laporan Hasil Pemeriksaan	Rp. 52.780.000
f. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Rp. 779.995.000
2. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Inspektorat Jenderal	Rp. 146.210.000
3. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Inspektorat Jenderal	Rp. 684.225.000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal	Rp. 1.262.500.000
5. Legislasi dan Litigasi Inspektorat Jenderal	Rp. 172.555.000
JUMLAH	Rp. 47.026.464.000

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua,



Tri Rismaharini

Pihak Pertama,



Dadang Iskandar



KEMENTERIAN SOSIAL RI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 INSPEKTUR JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Dody Sukmono
Jabatan : Plt. Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : Tri Rismaharini
Jabatan : Menteri Sosial RI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2023

Pihak Kedua,



Tri Rismaharini

Pihak Pertama,



Dody Sukmono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTUR JENDERAL**

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang berkualitas	1	Persentase batas materialitas temuan pengawasan	2
		2	Level Kapabilitas APIP (IACM)	3 (Integrated)
		3	Persentase rekomendasi hasil pengawasan eksternal yang ditindaklanjuti	70
		4	Nilai maturitas SPIP Satker Kementerian Sosial	3
		5	Jumlah Unit Kerja Eselon I yang mendapat nilai evaluasi SAKIP yang memuaskan (A)	3 Unit Kerja
		6	Jumlah satker yang memenuhi syarat diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM	5
2.	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial	7	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Inspektorat Jenderal	90

Program/Kegiatan Tahun 2023	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	
Kegiatan	
1. Pengelolaan Resiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal :	Rp. 18.108.704.000
a. Pengawasan Bidang Pemberdayaan Sosial	Rp. 3.305.050.000
b. Pengawasan Bidang Rehabilitasi Sosial	Rp. 3.248.870.000
c. Pengawasan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 3.342.070.000
d. Pengawasan Bidang Penunjang	Rp. 3.214.010.000
e. Analisis Laporan Hasil Pemeriksaan	Rp. 52.780.000
f. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Rp. 779.995.000
2. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Inspektorat Jenderal	Rp. 146.210.000
3. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Inspektorat Jenderal	Rp. 684.225.000
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM Inspektorat Jenderal	Rp. 1.262.500.000
5. Legislasi dan Litigasi Inspektorat Jenderal	Rp. 172.555.000
JUMLAH	Rp. 47.026.464.000

Jakarta, Februari 2023

Pihak Kedua,



Tri Rismaharini

Pihak Pertama,



Dedy Sukmono